

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2016-2021



Perkembangan **PEMBANGUNAN** PROVINSI SUMATERA BARAT 2016-2021



<https://sumbar.pps.go.id>

Perkembangan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

ISBN : -
No. Publikasi : 13000.2168
Katalog : 1105017.13
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 46 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat

Penyunting:

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat

Desain Kover:

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pencetak:

CV. Graphic Dwipa

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (UU No. 28 Tahun 28 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b).

Tim Penyusun

Pengarah : Ir. Herum Fajarwati, MM

Penanggung Jawab : Iman Teguh Raharto, S.Si, M.Si

Penyunting : Sumi Lestari, S.Si

Penulis Naskah : Lidya Sri Yeni, S.ST, M.Si
Riza Ulfina, SST, M.SE

Cover dan Infografis : Yanda Frimahatta, S.ST

<https://sumbar.bps.go.id>

KATA PENGANTAR


Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada periode sebelumnya dijalankan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Pada tahun 2021, pembangunan ini telah masuk dalam tahun kelima dari RPJMD Tahun 2016-2021. Oleh karena itu publikasi Perkembangan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 ini disusun dengan tujuan untuk melihat perkembangan pembangunan daerah Sumatera Barat selama tahun 2016-2021.

Pembahasan dalam publikasi ini akan dibatasi pada capaian pembangunan berdasarkan beberapa indikator ekonomi makro, indikator kesejahteraan sosial yang juga tertuang dalam RPJMD dan indikator lainnya. Indikator Ekonomi Makro terdiri dari Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, Inflasi dan Ekspor Impor. Indikator kesejahteraan sosial terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan komponen pembentuknya (Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah), Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran dan Nilai Tukar Petani (NTP). Selain itu juga akan dibahas perkembangan indikator pariwisata dan Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Publikasi ini dapat terbit berkat adanya kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan pembaca.

Padang, Desember 2021

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat



Ir. Herum Fajarwati, MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
1. Pendahuluan	1
2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat, 2016-2021	5
2.1 Penduduk	7
2.2 PDRB Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota	10
2.3 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Menurut Lapangan Usaha)	13
2.4 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha	16
2.5 Inflasi	18
2.6 Ekspor dan Impor	21
3. Perkembangan Indikator Sosial Kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat, 2016-2021	23
3.1 Tingkat Kemiskinan	25
3.2 Tingkat Pengangguran	30
3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	33
3.4 Nilai Tukar Petani (NTP)	36
4. Perkembangan Indikator Pariwisata dan Indeks Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2016-2021	39
4.1 Pariwisata	41
4.2 Indeks Pembangunan Daerah (IPD)	44
Daftar Pustaka	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2021 (Jiwa)	8
Tabel 2.2.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020 (Milyar Rupiah)	11
Tabel 2.3.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020 (Milyar Rupiah)	12
Tabel 2.4.	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020 (Persen)	17
Tabel 2.5.	Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020 (Juta US\$).....	21
Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, 2016-2021	25
Tabel 3.2.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2021	28
Tabel 3.3.	TPT Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2017-2021	32
Tabel 3.4.	IPM Menurut Komponen Pembentuknya Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, 2016-2021.....	34
Tabel 3.5.	IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2021	35
Tabel 4.1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2021	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 (Jiwa) ...	7
Gambar 2.2.	Rasio Ketergantungan Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, 2010-2035 (Persen).....	9
Gambar 2.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, 2016-2020	13
Gambar 2.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (Y-on-Y) dan (Q-to-Q) Provinsi Sumatera Barat, 2019-2021	15
Gambar 2.5.	Perkembangan Inflasi Kota Padang, Kota Bukittinggi, Gabungan 2 Kota dan Nasional, 2016-2020	19
Gambar 2.6.	Perkembangan Inflasi Kota Padang, Kota Bukittinggi, Gabungan 2 Kota dan Nasional, 2021	20
Gambar 2.7.	Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, 2021 (Juta US\$)	22
Gambar 3.1.	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, 2016-2021	26
Gambar 3.2.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2021	29
Gambar 3.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, 2016-2021 (Agustus)	30
Gambar 3.4.	TPT Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2021 (Agustus).....	31
Gambar 3.5.	Perkembangan NTP Tahunan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2016-2020.....	36
Gambar 3.6.	Perkembangan NTP Bulanan Sumatera Barat, 2021	37
Gambar 4.1.	TPK Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020.....	42
Gambar 4.2.	Perkembangan TPK Hotel Bintang di Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, 2021.....	43
Gambar 4.3.	Jumlah Desa/Nagari Menurut Kategori IPD Provinsi Sumatera Barat, 2014-2018.....	45

1 PENDAHULUAN



1. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu: (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia (*self-esteem*), dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from survitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia (Todaro dan Smith, 2003). Oleh karena itu pembangunan ekonomi bersifat multidimensi. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat sejalan dengan konsep pembangunan diatas. Pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Disana disebutkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus mengejar pertumbuhan ekonomi namun juga sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat seperti pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 disebutkan bahwa pembangunan daerah selama tahun 2011-2015 mengalami keberhasilan namun begitu masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus ditangani, yaitu diantaranya:

1. Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan

Jumlah dan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat telah mengalami penurunan dan lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional. Namun Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami peningkatan. Sebanyak 12 daerah kabupaten dan kota mempunyai tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesenjangan antar rumah tangga miskin dan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Indikasi ini perlu diatasi dengan melakukan intervensi yang lebih spesifik kepada keluarga miskin.

2. Kualitas Sumberdaya Manusia

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi IPM suatu daerah semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia daerah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat telah mengalami

peningkatan, namun salah satu komponen IPM yang perlu mendapat perhatian adalah rata-rata lama sekolah yang masih rendah. Artinya secara rata-rata tingkat pendidikan Sumatera Barat masih rendah.

3. Struktur Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi Sumatera Barat telah mengalami perubahan, namun peningkatan peranan sektor industri pengolahan dan konstruksi yang mempunyai produktivitas tinggi dan mempunyai dampak terhadap sektor lain belum seperti yang diharapkan.

4. Pengangguran

Tingkat pengangguran di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, namun pada tahun 2015 sedikit diatas tingkat pengangguran nasional.

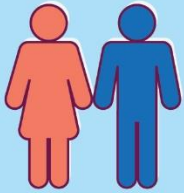
5. Pengembangan Pariwisata

Peranan pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat masih rendah, sementara potensi pariwisata tersebut sangat luar biasa baik dari sisi keindahan alam maupun dari sisi letak geografis. Berdasarkan potensi yang dimiliki tersebut, pariwisata yang menjadi sektor unggulan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja.

Berdasarkan permasalahan pembangunan Sumatera Barat yang dihadapi, maka Provinsi Sumatera Barat menetapkan program prioritas pembangunan daerah. Pembangunan Sumatera Barat tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam sepuluh prioritas pembangunan, diantaranya Pengembangan Pariwisata, Pengembangan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal. Untuk melihat keberhasilan pembangunan daerah digunakan beberapa indikator ekonomi dan sosial.

Pembahasan dalam publikasi ini akan dibatasi pada capaian pembangunan berdasarkan beberapa indikator ekonomi makro, indikator kesejahteraan sosial yang juga tertuang dalam RPJMD dan indikator lainnya. Indikator Ekonomi Makro terdiri dari Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, Inflasi dan Ekspor Impor. Indikator kesejahteraan sosial terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan komponen pembentuknya (Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah), Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran dan Nilai Tukar Petani (NTP). Selain itu juga akan dibahas perkembangan indikator pariwisata dan Indeks Pembangunan Desa (IPD).

2 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO PROVINSI SUMATERA BARAT 2016-2021



Rasio Jenis Kelamin
Tahun 2021

99,16

Diantara **100** orang perempuan terdapat **99** orang laki-laki



Jumlah Penduduk Sumatera Barat

2020	2021
5,53 juta jiwa	5,61 juta jiwa

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2015-2025 Hasil SUPas 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Sumatera Barat



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Laju Inflasi Gabungan Dua Kota
di Sumatera Barat



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

2. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO PROVINSI SUMATERA BARAT, 2016-2021

2.1 Penduduk

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah 42.012,89 km². Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016-2021 terus mengalami peningkatan (gambar 2.1). Berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebanyak 5.580.232 jiwa, mengalami peningkatan sebanyak 320.704 jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2016 yaitu 5.259.528 jiwa.

Gambar 2.1.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 (Jiwa)



Sumber:

2016-2019: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2010-2020 Provinsi Sumatera Barat (Pertengahan Tahun/Juni), BPS

2020 : Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September), BPS

2021 : Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan Tahun/Juni), BPS

Jika dilihat menurut wilayah kabupaten/kota (tabel 2.1), wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar pada tahun 2021 yaitu Kota Padang sebanyak 913.448 jiwa, diikuti oleh Kabupaten Agam sebanyak 534.202 jiwa. Sebaliknya Kota Padang Panjang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 56.971 jiwa.

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat, 2021 (Jiwa)

Kabupaten / Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Kab. Kep. Mentawai	45 891	42 498	88 389	107,98
02. Kab. Pesisir Selatan	256 560	253 058	509 618	101,38
03. Kab. Solok	198 346	195 891	394 237	101,25
04. Kab. Sijunjung	120 317	116 996	237 313	102,84
05. Kab. Tanah Datar	187 195	186 498	373 693	100,37
06. Kab. Padang Pariaman	216 308	216 710	433 018	99,81
07. Kab. Agam	269 495	264 707	534 202	101,81
08. Kab. Lima Puluh Kota	192 857	192 777	385 634	100,04
09. Kab. Pasaman	152 487	150 616	303 103	101,24
10. Kab. Solok Selatan	94 334	90 520	184 854	104,21
11. Kab. Dharmasraya	117 687	113 530	231 217	103,66
12. Kab. Pasaman Barat	220 999	215 314	436 313	102,64
71. Kota Padang	458 699	454 749	913 448	100,87
72. Kota Solok	37 522	36 947	74 469	101,56
73. Kota Sawahlunto	33 055	32 632	65 687	101,30
74. Kota Padang Panjang	28 627	28 344	56 971	101,00
75. Kota Bukittinggi	60 816	60 772	121 588	100,07
76. Kota Payakumbuh	71 084	70 100	141 184	101,40
77. Kota Pariaman	48 128	47 166	95 294	102,04
Sumatera Barat	2 810 407	2 769 825	5 580 232	101,47

Sumber: Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni), BPS

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Pada tahun 2021, rasio jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat 101,47 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini juga terjadi di hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat kecuali Kab. Padang Pariaman yang rasio jenis kelamin tahun 2021 yaitu 99,81

Gambar 2.2.
Rasio Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia,
2016-2021 (Persen)



Sumber:

2016-2019 : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2010-2020 Provinsi Sumatera Barat (Pertengahan Tahun/Juni), BPS

2020 : Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September), BPS

2021 : Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan Tahun/Juni), BPS

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, rasio jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019 kurang dari 100 yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2020, berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan rasio jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat sudah di atas 100, bagitu juga halnya dengan tahun 2021. Sedangkan jika dilihat secara total penduduk Indonesia, sejak 2016 sampai 2021 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari rasio jenis kelamin Indonesia tahun 2016-2021 lebih besar dari 100.

2.2 PDRB Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomidalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

Secara nominal, nilai PDRB Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga berlaku dari tahun 2016-2020 selalu mengalami kenaikan kecuali di tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 213,89 triliun rupiah dan pada tahun 2019 telah mencapai 245,98 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 32,09 triliun rupiah serta pada tahun 2020 menjadi 242,12 triliun rupiah (Tabel 2.2). Naiknya nilai PDRB ini bisa disebabkan oleh meningkatnya produksi dari lapangan usaha. Nilai PDRB pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan yang diakibatkan dampak dari pandemic COVID-19.

Sejalan dengan perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku tingkat provinsi, PDRB atas dasar harga berlaku setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat juga mengalami kenaikan selama tahun 2016-2020 (kecuali di tahun 2020 mengalami penurunan). Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB tertinggi selama tahun 2016-2020 adalah Kota Padang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2020 nilai PDRB ketiga kabupaten/kota tersebut mencapai masing-masing 62.222,36 milyar rupiah; 20.371,34 milyar rupiah dan 17.941,90 milyar rupiah. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PDRB terendah selama 2016-2020 adalah Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Solok, dengan nilai PDRB tahun 2020 masing-masing yaitu 3.473,24 milyar rupiah; 3.656,59 milyar rupiah dan 4.041,65 milyar rupiah.

Tabel 2.2.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018 ^r	2019 ^x	2020 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kab. Kep. Mentawai	3 725,73	4 001,87	4 252,82	4 641,48	4 628,65
02. Kab. Pesisir Selatan	11 271,40	12 069,52	13 045,98	14 035,65	13 995,04
03. Kab. Solok	11 053,49	11 783,87	12 653,86	13 578,37	13 511,12
04. Kab. Sijunjung	7 439,23	7 927,67	8 489,46	9 129,62	9 122,73
05. Kab. Tanah Datar	10 734,51	11 428,08	12 202,82	13 086,69	13 027,34
06. Kab. Padang Pariaman	17 532,87	19 038,38	20 438,32	21 252,42	17 941,90
07. Kab. Agam	16 693,05	17 834,99	19 145,92	20 537,08	20 371,33
08. Kab. Lima Puluh Kota	12 677,54	13 531,19	14 525,48	15 613,49	15 533,06
09. Kab. Pasaman	7 335,79	7 801,98	8 318,76	8 902,84	8 891,36
10. Kab. Solok Selatan	4 598,22	4 893,87	5 214,85	5 571,73	5 528,51
11. Kab. Dharmasraya	8 437,66	9 054,28	9 697,64	10 344,51	10 242,19
12. Kab. Pasaman Barat	12 794,25	13 699,70	14 603,18	15 390,74	15 245,61
71. Kota Padang	49 386,26	53 091,10	57 506,84	62 424,55	62 222,36
72. Kota Solok	3 241,25	3 469,04	3 728,26	4 047,92	4 041,65
73. Kota Sawahlunto	2 937,95	3 165,21	3 404,52	3 679,76	3 656,59
74. Kota Padang Panjang	2 774,05	2 974,35	3 198,03	3 474,77	3 473,24
75. Kota Bukittinggi	6 783,09	7 453,11	8 011,06	8 695,10	8 627,59
76. Kota Payakumbuh	5 203,12	5 639,68	6 134,70	6 824,43	6 823,64
77. Kota Pariaman	4 036,74	4 309,01	4 615,75	5 005,43	4 994,10
Jumlah	198 656,20	213 166,90	229 235,01	246 236,59	241 878,02
Sumatera Barat¹	196 099,18	213 893,47	230 571,99	245 982,64	242 118,76

Catatan: ^r Angka Revisi

^x Angka Sementara

^{xx}Angka Sangat Sementara

¹ Dihitung secara terpisah dari penghitungan PDRB Kabupaten/Kota

Sumber: Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2021, BPS

Jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, perkembangan angka PDRB Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016-2020 juga mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi pada PDRB

atas dasar harga konstan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pada Tabel 2.3 terlihat bahwa PDRB Provinsi Sumatera Barat meningkat dari 148,13 triliun rupiah tahun 2016 menjadi 172,21 triliun rupiah di tahun 2019, dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 169,46 triliun rupiah.

Tabel 2.3.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018 ^r	2019 ^x	2020 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kab. Kep. Mentawai	2 608,13	2 741,55	2 875,66	3 011,72	2 956,01
02. Kab. Pesisir Selatan	8 232,59	8 678,05	9 139,97	9 576,67	9 470,78
03. Kab. Solok	8 511,65	8 964,87	9 430,22	9 905,14	9 794,24
04. Kab. Sijunjung	5 829,04	6 135,76	6 446,99	6 757,04	6 683,02
05. Kab. Tanah Datar	8 355,07	8 782,10	9 224,52	9 684,47	9 575,50
06. Kab. Padang Pariaman	11 697,04	12 350,19	13 021,89	13 334,92	11 939,48
07. Kab. Agam	12 567,02	13 249,25	13 942,52	14 608,90	14 407,14
08. Kab. Lima Puluh Kota	9 611,26	10 123,65	10 653,26	11 192,43	11 062,31
09. Kab. Pasaman	5 342,90	5 614,28	5 893,34	6 176,33	6 122,76
10. Kab. Solok Selatan	3 435,70	3 612,64	3 793,18	3 977,41	3 928,03
11. Kab. Dharmasraya	6 490,29	6 843,18	7 204,47	7 560,32	7 454,97
12. Kab. Pasaman Barat	9 857,62	10 384,39	10 925,63	11 411,83	11 259,45
71. Kota Padang	37 350,20	39 675,73	42 081,54	44 459,30	43 631,43
72. Kota Solok	2 440,13	2 580,78	2 726,71	2 876,46	2 835,75
73. Kota Sawahlunto	2 380,52	2 517,15	2 655,62	2 796,54	2 760,93
74. Kota Padang Panjang	2 186,01	2 312,71	2 444,77	2 580,61	2 543,40
75. Kota Bukittinggi	5 168,98	5 483,40	5 812,39	6 152,08	6 045,09
76. Kota Payakumbuh	3 767,27	3 997,85	4 238,66	4 488,20	4 413,63
77. Kota Pariaman	3 062,31	3 234,23	3 411,29	3 592,02	3 544,66
Jumlah	148 893,74	157 281,78	165 922,64	174 142,41	170 428,59
Sumatera Barat¹	148 134,24	155 984,36	163 966,19	172 213,79	169 458,11

Catatan: ^r Angka Revisi

^x Angka Sementara

^{xx} Angka Sangat Sementara

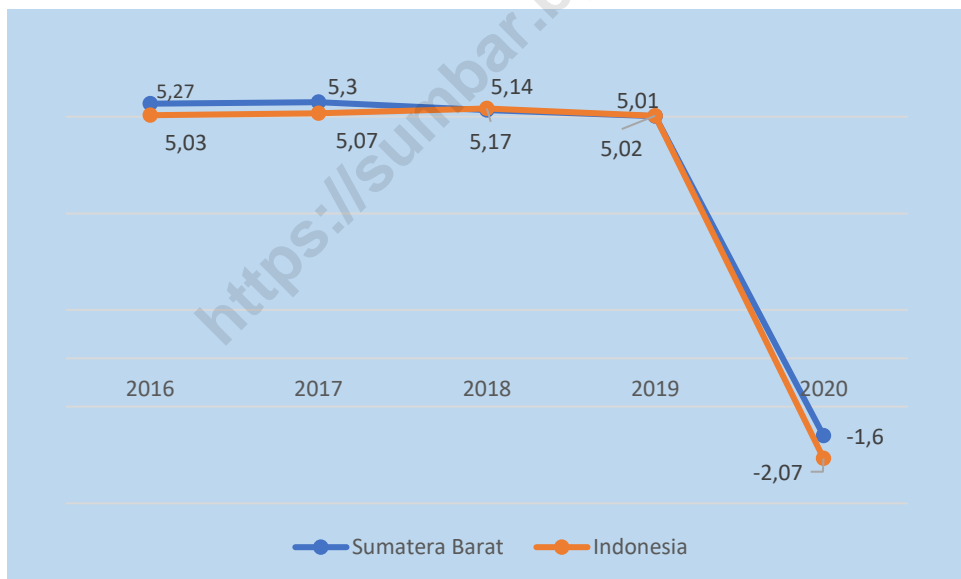
¹ Dihitung secara terpisah dari penghitungan PDRB Kabupaten/Kota

Sumber: Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2021, BPS

2.3 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Menurut Lapangan Usaha)

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menggambarkan bagaimana capaian pembangunan suatu daerah. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari penghitungan PDRB atas dasar harga konstan. Gambar 2.3 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 berfluktuasi, tetapi cenderung melambat, kecuali di tahun 2017. Dan mengalami kontraksi di tahun 2020. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama lima tahun ini trennya melambat tetapi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih diatas pertumbuhan ekonomi nasional (Gambar 2.3).

Gambar 2.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia,
2016-2020



Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2020, BPS

Banyak faktor yang mempengaruhi pelambatan perekonomian suatu daerah, baik berasal dari faktor internal dan eksternal daerah tersebut. Perlambatan ini bisa diakibatkan dari pengaruh kondisi ekonomi nasional maupun global. Selain itu juga dipengaruhi oleh lemahnya harga komoditas terutama komoditas pertanian, Hal ini menyebabkan pendapatan rumah tangga pertanian terutamanya perkebunan mengalami penurunan. Selanjutnya penurunan pendapatan ini memicu turunnya

konsumsi rumah tangga. Hal ini berdampak pada lesunya aktivitas perdagangan dan permintaan akan barang hasil industri. Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan juga menunjukkan pelemahan pertumbuhan (BPS, 2016).

Tentu saja telah banyak upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Sumatera Barat, salah satunya dengan investasi. Namun menurut Syafitri dan Ariuni (2019) dalam penelitiannya investasi swasta dalam hal ini realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi PMA di Sumatera Barat tidak mampu meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat. Justru yang memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat adalah pengeluaran belanja pemerintah dan dana perimbangan. Sehingga pemerintah Sumatera Barat hendaknya menitikberatkan pada faktor-faktor yang memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

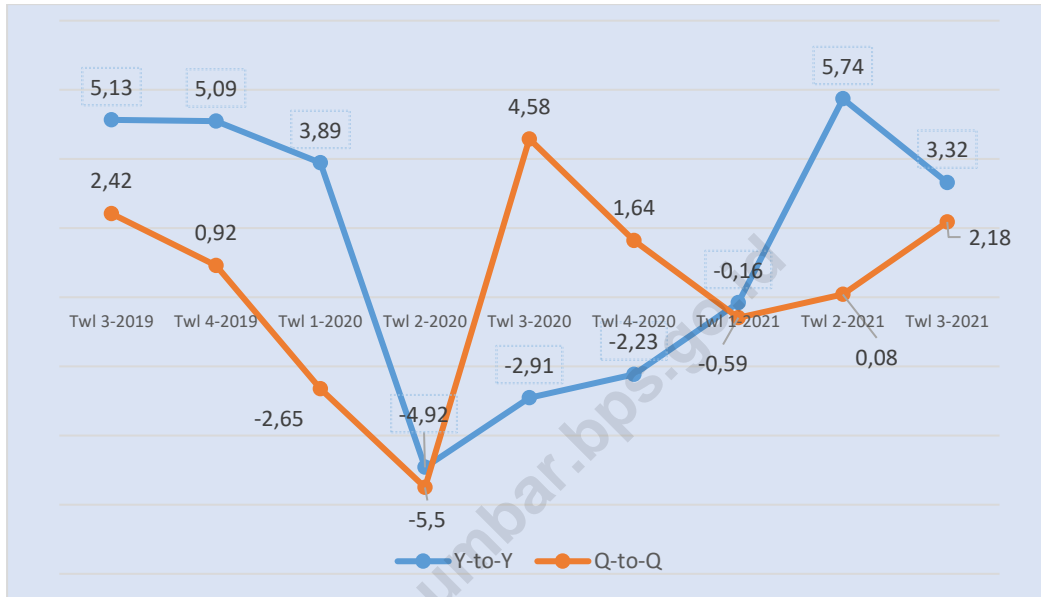
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2021

Pada awal tahun 2020 mulai terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia dan penyebaran virusnya masih terjadi sampai saat ini. Pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh Sumatera Barat tapi juga di seluruh dunia. Sebagai langkah pemutusan rantai penyebaran virus tersebut Pemerintah Sumatera Barat memberlakukan pembatasan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat seperti bekerja dari rumah, penutupan usaha penyedia makan dan minum dan sebagainya. Hal ini berimbas terhadap perekonomian Sumatera Barat.

Seperti yang terlihat pada gambar 2.4, pada triwulan I 2021 laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar -0,16 persen (*Y-on-Y*), melambat dibandingkan dengan triwulan I tahun 2020 (3,89 persen). Jika dibandingkan dengan triwulan II 2021 (*Q-to-Q*) tumbuh 0,08 persen.

Pada triwulan II tahun 2021 Sumatera Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang tumbuh sebesar 5,74 persen (*Y-on-Y*) dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020 (-4,92 persen). Jika dibandingkan dengan triwulan I 2021 (*Q-to-Q*) terkontraksi 0,59 persen.

Gambar 2.4.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (**Y-on-Y**) dan (**Q-to-Q**)
Provinsi Sumatera Barat, 2019-2021



Sumber: Kumpulan BRS Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat 2019-2021, BPS

Pada triwulan III 2021, perekonomian Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan (3,32 persen) yang cukup meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (-2,91 persen). Pertumbuhan ini hampir pada semua lapangan usaha kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; Administrasi Pemerintahan; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Pendidikan yang mengalami kontraksi. Pertumbuhan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas; Jasa Keuangan; dan Jasa Lainnya merupakan lapangan usaha tertinggi (9,35 persen, 8,61 persen dan 7,59 persen). Demikian juga jika dibandingkan dengan triwulan II 2021 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat triwulan III 2021 meningkat sebesar 2,18 persen (*Q-to-Q*). Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada beberapa wilayah dengan beberapa tingkatan aturan oleh pemerintah Sumatera Barat selama pandemi COVID-19 ikut memberikan imbas bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat

2.4 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Ada 17 sektor lapangan usaha pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Lima lapangan usaha yang memberikan peranan terbesar bagi PDRB Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (24,06 persen); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (14,76 persen); Transportasi dan Pergudangan (12,46 persen); Industri Pengolahan (10,09 persen) dan Konstruksi (9,29 persen).

Selama kurun waktu lima tahun (2016-2020) kelima lapangan usaha tersebut masih tetap mendominasi dalam pembentukan PDRB (Tabel 2.4). Namun besaran peranan masing-masing dari lapangan usaha tersebut berangsur-angsur mulai bergeser. Pada tahun 2020 persentase lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Konstruksi mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar 15,76 persen dan 10,19 persen. Sedangkan tiga sektor lainnya mengalami penurunan yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,38 persen); Transportasi dan Pergudangan (10,44 persen); serta Industri Pengolahan (8,64 persen).

Selain itu hampir semua lapangan usaha yang mengalami kenaikan sejak tahun 2016-2019, dan beberapa yang mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan pengadaan listrik tetap memberikan peranan paling rendah sepanjang tahun 2016-2020 yaitu sebesar 0,09 persen dan 0,10-0,11 persen.

Tabel 2.4.
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha,
Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020 (Persen)

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018 ^r	2019 ^x	2020 ^{xx}
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,06	23,61	23,17	22,15	22,38
B	Pertambangan dan Penggalian	4,53	4,27	4,27	4,30	4,27
C	Industri Pengolahan	10,09	9,74	9,10	8,38	8,64
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	9,29	9,35	9,63	10,09	10,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	14,76	14,91	15,30	15,78	15,76
H	Transportasi dan Pergudangan	12,46	12,65	12,65	12,60	10,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,29	1,33	1,37	1,43	1,24
J	Informasi dan Komunikasi	4,99	5,28	5,46	5,81	6,44
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	3,17	3,10	3,01	2,91	3,04
L	Real Estat	2,01	1,97	1,96	2,01	2,06
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,82	5,83	5,92	6,13	6,71
P	Jasa Pendidikan	3,84	4,13	4,20	4,35	4,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,34	1,39	1,42	1,62
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,77	1,84	1,93	2,00	1,88
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: ^r Angka Revisi

^x Angka Sementara

^{xx} Angka Sangat Sementara

Sumber: Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2021, BPS

2.5 Inflasi

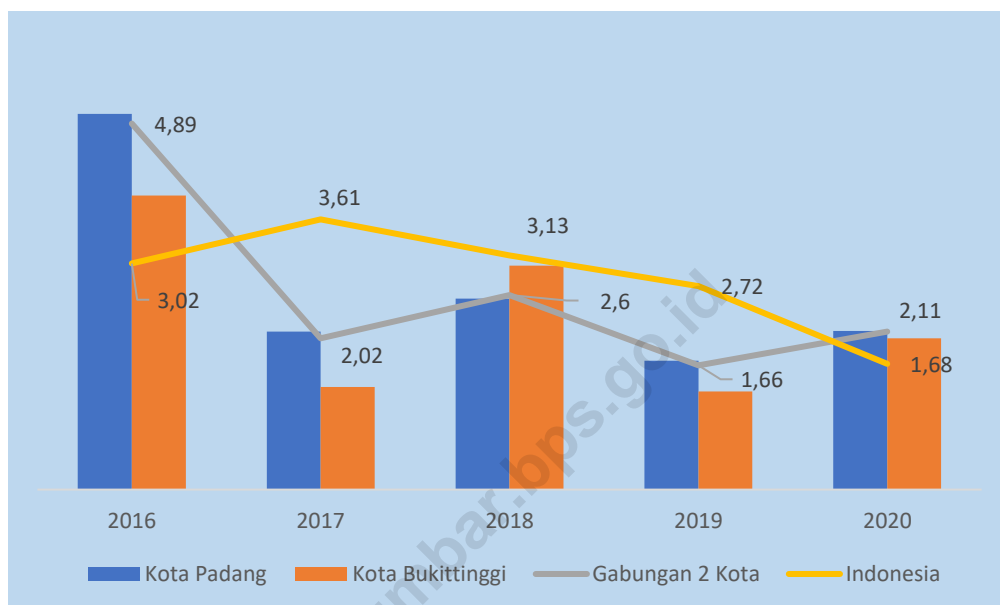
Inflasi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang mengukur persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa di suatu waktu. Inflasi diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari kelompok komoditas. Kelompok komoditas tersebut antara lain kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga; serta kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi. Ketika terjadi inflasi atau ada kenaikan harga barang maka nilai mata uang akan mengalami penurunan dan juga mengurangi daya beli masyarakat. Hal ini tentu saja berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari terutama kebutuhan bahan pokok. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi, diantaranya faktor permintaan masyarakat, gangguan produksi, distribusi, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu peran pemerintah sangatlah diperlukan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga-harga barang atau jasa tersebut. Pengukuran inflasi BPS di Provinsi Sumatera Barat baru mencakup Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Perkembangan Inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi selama tahun 2016-2020 berfluktuasi (gambar 2.5). Secara gabungan 2 kota, inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi selalu berada dibawah inflasi tingkat nasional kecuali tahun 2016 dan 2020, dimana inflasi kedua kota tersebut jauh diatas angka nasional yaitu 4,89 persen dan 2,11 persen, sedangkan nasional sebesar 3,02 persen dan 1,68 persen. Inflasi pada tahun 2016 tersebut merupakan tingkat inflasi tertinggi gabungan dua kota di Sumatera Barat selama tahun 2016-2020, sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,66 persen.

Tingginya inflasi di tahun 2016 karena andil dari kenaikan harga komoditas cabe merah dan angkutan udara di hari raya umat Islam atau bulan Juli. Selain itu juga ada kenaikan harga bawang merah dan telur ayam ras. Jika dilihat keterbandingan antara kedua kota inflasi di Provinsi Sumatera Barat, selama tahun 2016-2020 inflasi Kota Padang selalu lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Bukittinggi kecuali di tahun 2018.

Gambar 2.5.
Perkembangan Inflasi Kota Padang, Kota Bukittinggi,
Gabungan 2 Kota dan Nasional, 2016-2020



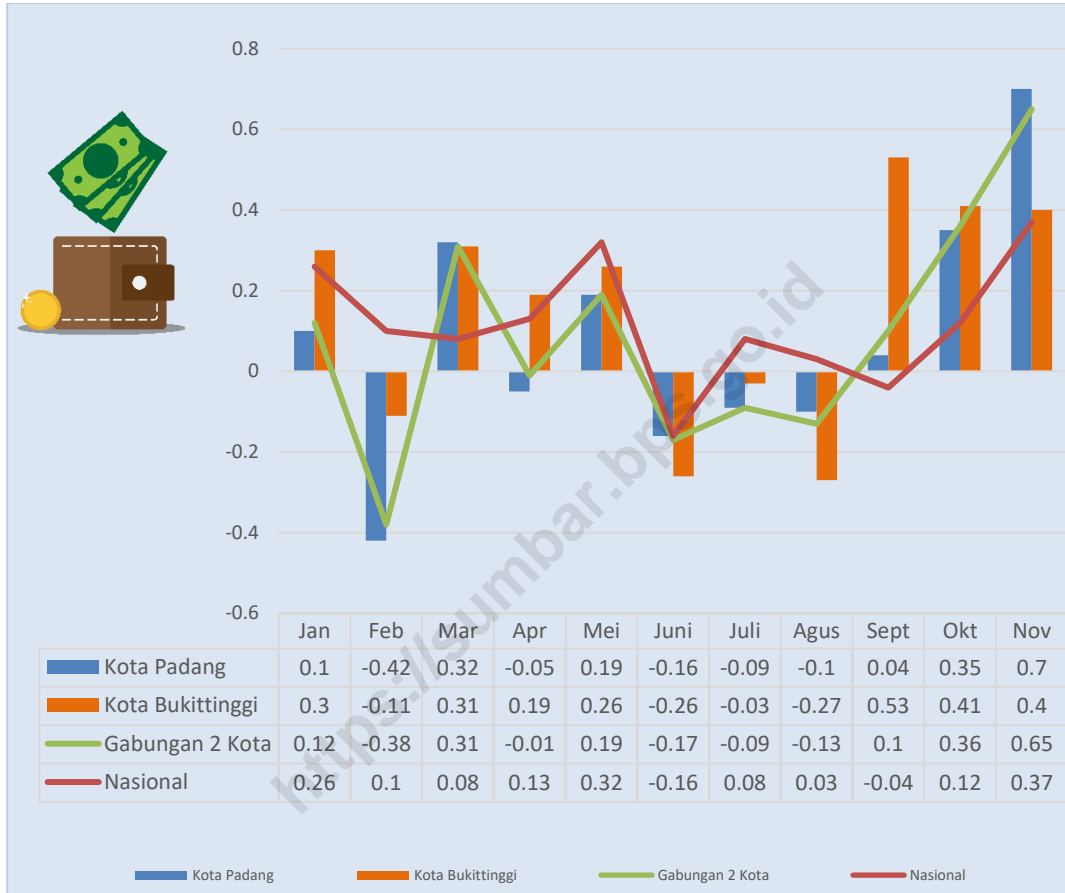
Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2020, BPS

Pertumbuhan Inflasi Tahun 2021

Pada awal tahun 2021 inflasi Kota Bukittinggi berada diatas inflasi nasional yaitu 0,30 persen sedangkan nasional 0,26 persen. Sebaliknya Inflasi Kota Padang berada dibawah nasional yaitu sebesar 0,10 persen. Pandemi COVID19 memberikan pengaruh terhadap perubahan harga-harga barang. Pada gambar 2.6 terlihat bahwa terjadi deflasi sejak Februari sampai Agustus 2021 kecuali bulan Maret dan Mei 2021 (gabungan 2 kota). Sedangkan laju inflasi Indonesia terus menurun, walaupun pada bulan Mei sempat mengalami kenaikan, namun terjadi deflasi pada Juni dan September 2021.

Jika dilihat berdasarkan kota inflasi di Sumatera Barat, terjadi penurunan persentase IHK (deflasi) di Kota Padang sejak Februari 2021 sampai Agustus 2021, kecuali bulan Maret dan Mei 2021. Namun keadaan dari September 2021 sampai November 2021 terjadi kenaikan harga-harga (inflasi), yaitu sebesar 0,04 persen, 0,35 persen dan 0,70 persen.

Gambar 2.6.
Perkembangan Inflasi Kota Padang, Kota Bukittinggi,
Gabungan 2 Kota dan Nasional, 2021



Sumber: Kumpulan BRS Perkembangan Inflasi Sumatera Barat 2021, BPS

Dan di Kota Bukittinggi terjadi hal yang hampir sama, yaitu terjadi penurunan persentase IHK (deflasi) di Kota Bukittinggi sejak Februari 2021 sampai Agustus 2021, kecuali bulan Maret, April dan Mei 2021. Namun keadaan dari September 2021 sampai November 2021 terjadi kenaikan harga-harga (inflasi) yaitu sebesar 0,53 persen, 0,41 persen dan 0,40 persen.

2.6 Ekspor dan Impor

Perkembangan ekspor dan impor dari Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016-2021 berfluktuasi. Seperti yang terlihat pada tabel 2.5, nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar US\$ 2.046,27 juta, kemudian terus turun menjadi US\$ 1.531,84 juta pada tahun 2020. Sebaliknya untuk impor, nilai impor tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar US\$ 546,34 juta dan pada tahun 2020 turun menjadi US\$ 186,40 juta. Neraca perdagangan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2021 selalu mengalami surplus walaupun secara nominal berfluktuasi. Pada tahun 2020 mencapai US\$ 1.345,44 juta dimana mengalami kenaikan 49,34 persen dibandingkan neraca perdagangan tahun 2019.

Tabel 2.5.
Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020 (Juta US\$)

Tahun	Ekspor	Impor	Neraca Perdagangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	1 708,28	345,25	1 363,03
2017	2 046,27	446,26	1 600,01
2018	1 598,61	546,34	1 052,27
2019	1 339,15	438,20	900,95
2020	1 531,84	186,40	1 345,44

Sumber: Statistik Ekspor Impor Provinsi Sumatera Barat 2020, BPS

Komoditi yang paling besar nilai ekspornya selama periode 2016-2020 adalah minyak kelapa sawit. Hal ini sejalan dengan jumlah produksi perkebunan rakyat terbesar di Provinsi Sumatera Barat yaitu kelapa sawit. Produksi kelapa sawit Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mencapai 567.930 ton. Pada tahun 2020, tiga jenis komoditi ekspor terbesar berturut-turut yaitu minyak kelapa sawit (US\$ 1.186,58 juta), karet remah (US\$ 137,35 juta) dan semen (US\$ 50,22 juta). Negara tujuan ekspor terbesar pada tahun 2020 yaitu India (US\$ 397,74 juta), Amerika Serikat (US\$ 219,27 juta) dan Tiongkok (US\$ 173,96 juta).

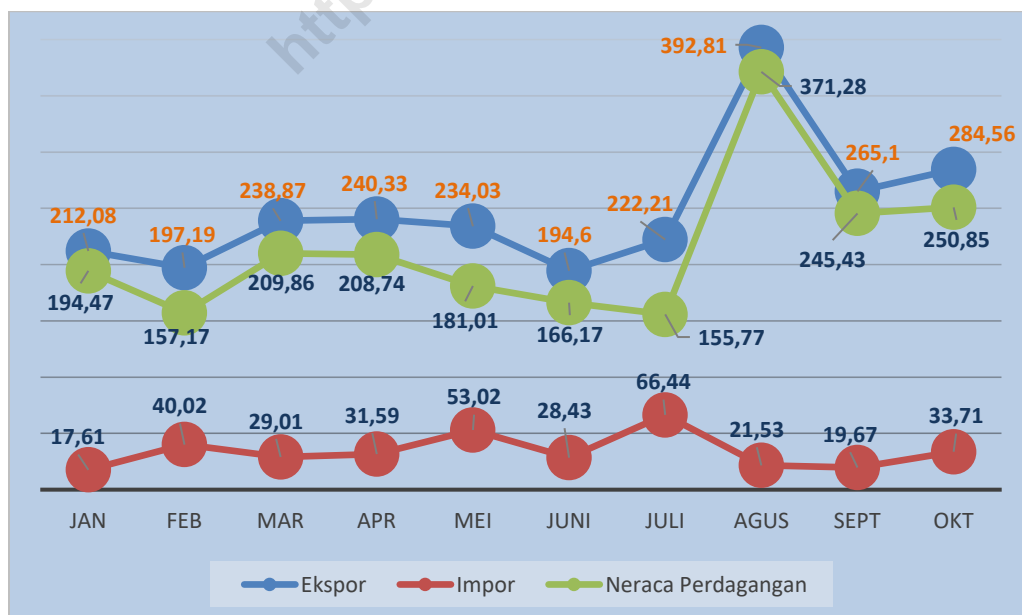
Komoditi impor terbesar pada tahun 2020 adalah bahan bakar, bahan penyemir dll (US\$ 221,78 juta); bahan kimia dan produknya (US\$ 165,05 juta); serta bahan baku

dan hasil tambang (US\$ 187,69 juta). Negara asal impor terbesar berasal dari Singapura (US\$ 77,49 juta), Malaysia (US\$ 25,25 juta) dan Rusia (US\$ 15,32 juta).

Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2021

Perkembangan ekspor dan impor Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 sangat berfluktuasi (gambar 2.7). Total nilai ekspor selama Januari-Oktober 2021 mencapai US\$ 2.481,78 juta atau naik 54,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai ekspor terendah terjadi pada bulan Juni 2021 yaitu hanya US\$ 194,60 juta dan tertinggi terjadi di bulan Agustus 2021 sebesar US\$ 392,81 juta. Sedangkan untuk impor, secara kumulatif nilai impor selama Januari-Oktober 2021 mencapai US\$ 341,03 juta atau mengalami kenaikan 51,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor terendah terjadi pada bulan Januari 2021 yaitu hanya US\$ 17,61 juta dan tertinggi terjadi di bulan Juli 2021 sebesar US\$ 66,44 juta. Neraca perdagangan Provinsi Sumatera Barat masih mengalami surplus selama tahun 2021.

Gambar 2.7.
Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Provinsi Sumatera Barat, 2021 (Juta US\$)



Sumber: Kumpulan BRS Perkembangan Ekspor Impor Sumatera Barat 2021, BPS

3 PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL KESEJAHTERAAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2016-2021



Tingkat Kemiskinan Penduduk Sumatera Barat Maret 2021

6,63 %



Dalam 6*) tahun terakhir, sebanyak **885** jiwa telah keluar dari garis kemiskinan

*Maret 2016-Maret 2021

Atau setara **370.670** jiwa

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat Agustus 2021

6,52 %

Setiap **100 orang Angkatan Kerja** terdapat **6 sampai 7 orang** yang **MENGANGGUR**



Dalam 6*) tahun terakhir, pengangguran di Sumatera Barat didominasi oleh pengangguran yang berpendidikan SLTA (SMA/SMK)



Tingkat Kemiskinan Tahun 2020 dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021

Berdasarkan Kabupaten/Kota



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat 2021

72,65

Termasuk ke dalam **Kategori TINGGI**



Dalam 5*) tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat **selalu mengalami peningkatan**

3. PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL KESEJAHTERAAN PROVINSI SUMATERA BARAT, 2016-2021

3.1 Tingkat Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Garis kemiskinan (GK) per bulan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan merupakan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin Maret 2021 adalah Rp.568.703,- (kapita/bulan). Selama tahun 2016-2021 garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat naik 33,77 persen.

Tabel 3.1.

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

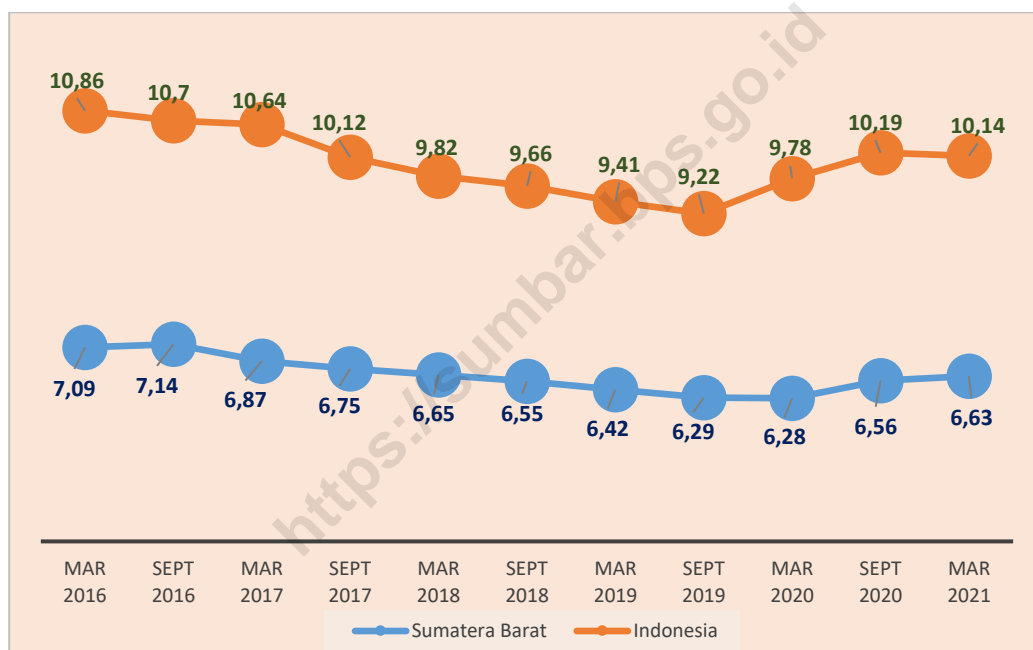
Tahun	Bulan	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Penduduk Miskin (persen)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	Maret	425 141	371 555	7,09	1,10	0,24
	September	438 075	376 510	7,14	1,12	0,28
2017	Maret	453 612	364 513	6,87	1,00	0,23
	September	455 797	359 990	6,75	0,99	0,23
2018	Maret	476 554	357 130	6,65	1,04	0,24
	September	485 633	353 240	6,55	0,96	0,21
2019	Maret	503 652	348 220	6,42	0,94	0,21
	September	529 700	343 090	6,29	0,78	0,15
2020	Maret	544 315	344 230	6,28	0,92	0,20
	September	547 240	364 790	6,56	0,99	0,26
2021	Maret	568 703	370 670	6,63	1,04	0,24

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021, BPS

Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. Pada Tabel 3.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dari Maret 2016-Maret 2020 turun secara signifikan dari 371.555 jiwa (Maret 2016) menjadi 344.230 jiwa (Maret 2020) dan mengalami peningkatan menjadi 370.670 jiwa (Maret 2021).

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, karena dari tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera pada dasarnya merupakan tujuan dari pembangunan daerah. Begitu juga halnya dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, penurunan tingkat kemiskinan dijadikan salah satu dari prioritas RPJMD. Tingkat kemiskinan digambarkan dengan persentase penduduk miskin.

Gambar 3.1.
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, 2016-2021



Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021, BPS

Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dari tahun Maret 2016-Maret 2020 mengalami penurunan, kecuali di September 2020-Maret 2021 terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dari 6,29 persen (September 2019) menjadi 6,56 persen (September 2020) dan 6,28 persen (Maret 2020) menjadi 6,63 persen (Maret 2021). Selama kurun waktu 2016-2021 ini tingkat kemiskinan Sumatera Barat selalu berada di bawah tingkat kemiskinan nasional.

Ukuran tingkat kemiskinan tidak bisa menjelaskan seberapa miskin/sengsara penduduk miskin tersebut, mengingat ukuran tersebut tidak banyak berubah ketika sekelompok penduduk miskin menjadi lebih miskin lagi dari satu waktu ke waktu lain.

Ukuran kemiskinan juga mempertimbangkan sebaran atau distribusi pendapatan diantara penduduk miskin. Ukuran tersebut adalah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan (Foster;1984 dalam Irawan dkk; 2016).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antar penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016-2021 cukup berfluktuasi (Tabel 3.1). Sejak tahun 2018 sampai 2019 (September) nilai P1 mengalami penurunan dan mulai tahun 2020 (Maret) naik menjadi 0,92 persen dan 1,04 (Maret 2021). Ini berarti kesenjangan antara rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin dan garis kemiskinan adalah relatif kecil.

Hal yang sama juga terjadi dengan nilai indeks keparahan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat juga berfluktuasi selama 2016-2021. Nilai P2 tertinggi pada September 2016 yaitu 0,28 persen dan terendah pada September 2019 sebesar 0,15 persen. Namun Nilai P2 Sumatera Barat naik menjadi 0,20 persen pada Maret 2020 dan 0,24 pada Maret 2021. Walaupun begitu, ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin pada Maret 2021 tidak begitu timpang.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa dari tahun 2016-2021 persentase penduduk miskin di semua kabupaten/kota mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali di tahun 2021 mengalami peningkatan. Angka kemiskinan yang terus menurun menunjukkan kesejahteraan penduduk Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun 2016-2020, dan mengalami peningkatan di tahun 2021 akibat pandemi Covid19.

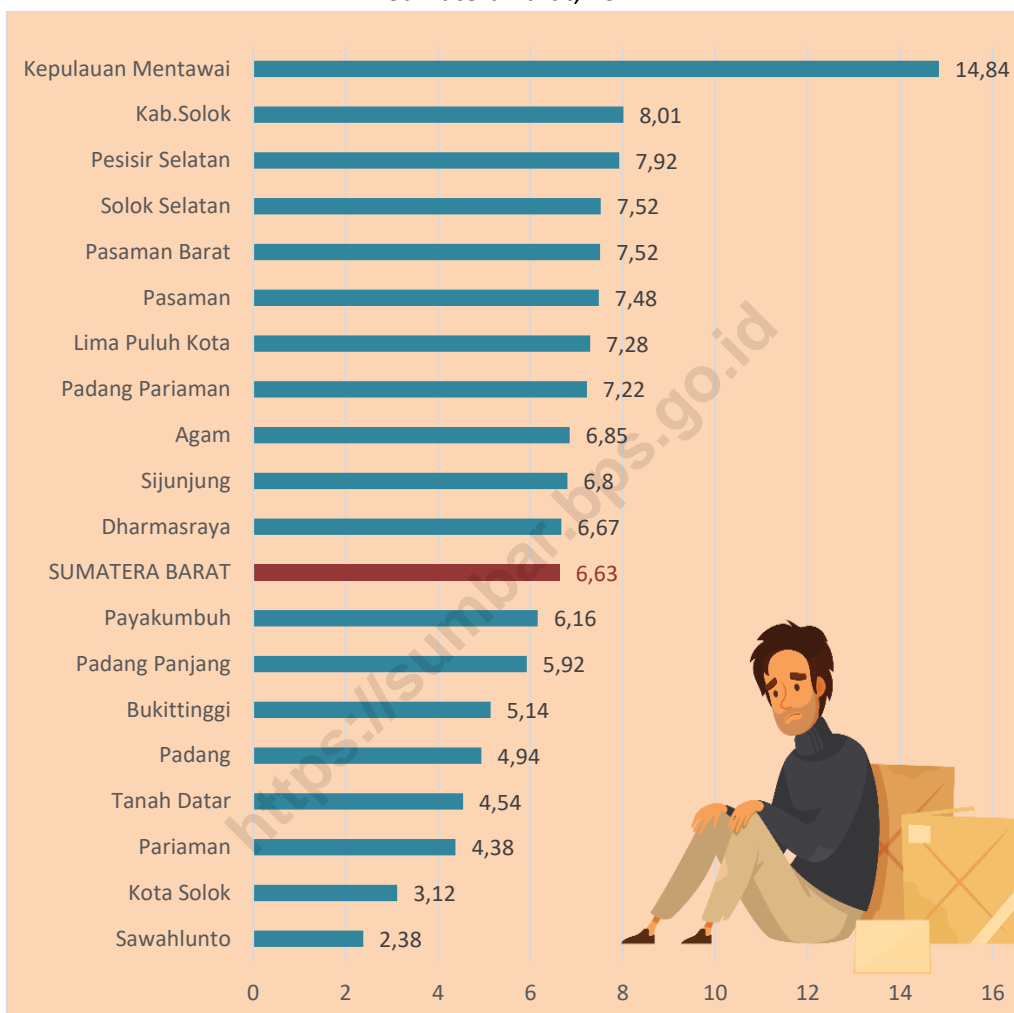
Tabel 3.2.
 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
 2016-2021

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kab. Kep. Mentawai	15,12	14,67	14,44	14,43	14,35	14,84
02. Kab. Pesisir Selatan	7,92	7,79	7,59	7,88	7,61	7,92
03. Kab. Solok	9,32	9,06	8,88	7,98	7,81	8,01
04. Kab. Sijunjung	7,60	7,35	7,11	7,04	6,78	6,80
05. Kab. Tanah Datar	5,68	5,56	5,32	4,66	4,40	4,54
06. Kab. Padang Pariaman	8,91	8,46	8,04	7,10	6,95	7,22
07. Kab. Agam	7,83	7,59	6,76	6,75	6,75	6,85
08. Kab. Lima Puluh Kota	7,59	7,15	6,99	6,97	6,86	7,29
09. Kab. Pasaman	7,65	7,41	7,31	7,21	7,16	7,48
10. Kab. Solok Selatan	7,35	7,21	7,07	7,33	7,15	7,52
11. Kab. Dharmasraya	7,16	6,68	6,42	6,29	6,23	6,67
12. Kab. Pasaman Barat	7,40	7,26	7,34	7,14	7,04	7,51
71. Kota Padang	4,68	4,74	4,70	4,48	4,40	4,94
72. Kota Solok	3,86	3,66	3,30	3,24	2,77	3,12
73. Kota Sawahlunto	2,21	2,01	2,39	2,17	2,16	2,38
74. Kota Padang Panjang	6,75	6,17	5,88	5,60	5,24	5,92
75. Kota Bukittinggi	5,48	5,35	4,92	4,60	4,54	5,14
76. Kota Payakumbuh	6,46	5,88	5,77	5,68	5,65	6,16
77. Kota Pariaman	5,23	5,20	5,03	4,76	4,10	4,38
Sumatera Barat	7,09	6,87	6,65	6,42	6,28	6,63

Sumber: Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2021, BPS

Selama tahun 2016-2018 tiga kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok dan Kabupaten Padang Pariaman. Tahun 2019, Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan sehingga posisi tiga tertinggi di tempati oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan terendah selama 2016-2021 adalah Kota Sawahlunto yaitu berkisar 2 persen.

Gambar 3.2.
 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2021



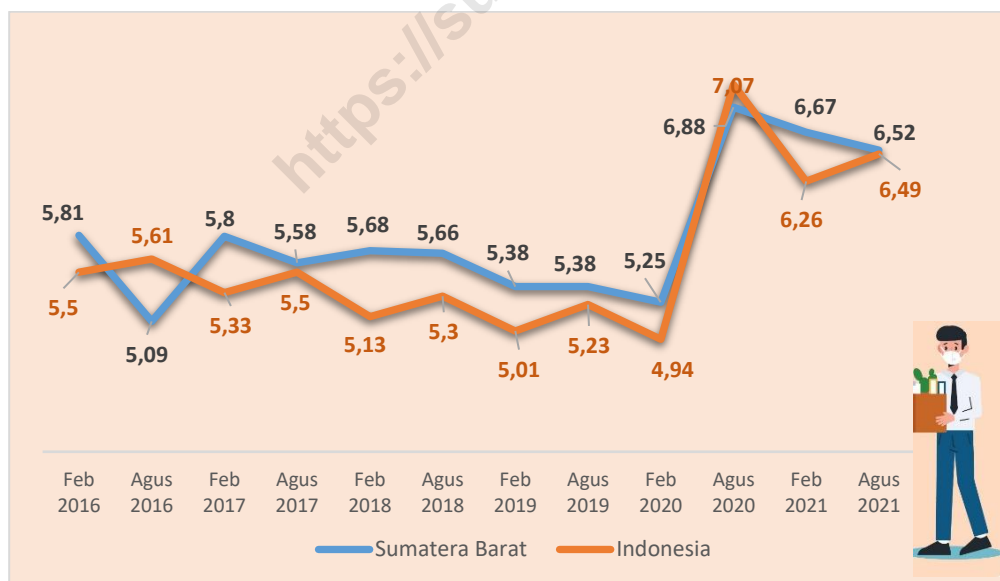
Sumber: Website Provinsi Sumatera Barat (<https://sumbar.bps.go.id>) 2021, BPS

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa lebih separoh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 memiliki tingkat kemiskinan diatas tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2016, ada 11 kabupaten/kota yang tingkat kemiskinan diatas tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, sedangkan di tahun 2020 turun sebanyak 10 kabupaten/kota dan di tahun 2021 kembali sebanyak 11 kabupaten/kota yang tingkat kemiskinan diatas tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

3.2 Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Gambar 3.3 memperlihatkan bahwa selama periode 2016-2021 TPT Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi dan nilainya selalu berada diatas angka nasional kecuali pada Agustus 2016 dan Agustus 2020. TPT Provinsi Sumatera Barat Agustus 2016 sebesar 5,09 persen dan Agustus 2020 sebesar 6,88, sedangkan TPT Indonesia 5,61 persen (Agustus 2016) dan 7,07 persen (Agustus 2020). Jika dibandingkan dengan Februari 2016, TPT Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari 5,81 persen pada Februari 2016 menjadi 6,67 persen pada Februari 2021 atau naik 0,86 poin. Berbeda dengan tren sebelumnya yang cenderung menurun, nilai TPT pada Februari 2021 (6,67 persen) mengalami peningkatan sebesar 1,42 poin dibandingkan Februari 2020 (5,25 persen).

Gambar 3.3.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, 2016-2021



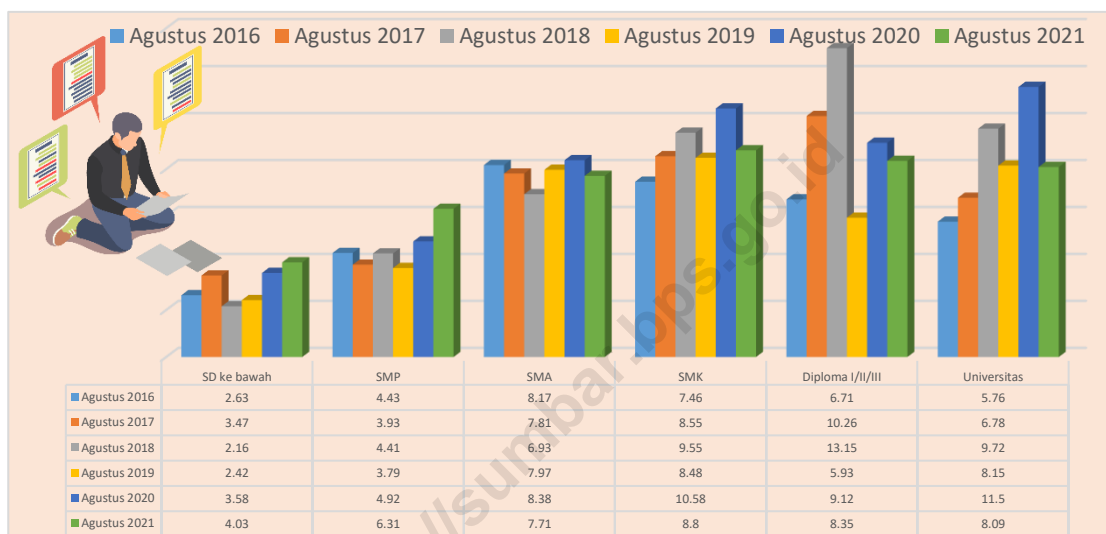
Catatan : Angka TPT 2018-2021 menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2020 dan BRS Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat 2021, BPS

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, terlihat bahwa pengangguran di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2021 didominasi oleh

pengangguran yang berpendidikan SMA ke atas (gambar 3.4). Tahun 2016 TPT tertinggi adalah SMA sebesar 8,17 persen (Agustus 2016) dan Agustus 2021 TPT tertinggi adalah lulusan SMK sebesar 8,80 persen.

Gambar 3.4.
TPT Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2021 (Agustus)



Catatan : Angka TPT 2018-2021 menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Sumber: Kumpulan BRS Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Agustus 2016-2021, BPS

Pengangguran terdidik menjadi masalah tersendiri dan isu besar saat ini. Hal ini dikarenakan para pencari kerja yang terdidik biasanya lebih memilih-milih jenis pekerjaan sedangkan kebutuhan usaha sangat terbatas (*demand* dan *supply* tidak seimbang), sehingga pencari kerja terdidik lebih lama mendapatkan pekerjaan.

Pakar hukum ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Palawan Simanjuntak dalam Prakasa dan Andini (2020) menjelaskan alasan Indonesia punya banyak pengangguran terdidik. Sistem pendidikan di Indonesia masih minim membangun jiwa kreativitas dan inovasi. Padahal pengetahuan saja tidak cukup, harus diimbangi dengan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri. Kesiapan tenaga kerja, investasi dan pengembangan SDM, serta daya tarik tenaga kerja merupakan pekerjaan rumah baik pemerintah maupun individu, agar tenaga kerja mampu bersaing baik di dalam maupun luar negeri. Dari sisi pemerintah, Palawan mengingatkan pentingnya investasi bagi perkembangan dunia usaha. Selain itu juga

penting memasukkan bobot besar dalam aspek *entrepreneurship* pada pelatihan pra kerja.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota

Selama tahun 2016-2020 Kota Padang masih menduduki posisi tertinggi tingkat pengangguran terbukanya, walaupun trennya dari tahun ke tahun menurun, kecuali di tahun 2020 terjadi peningkatan akibat pandemic COVID-19. Sebaliknya untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki TPT paling rendah pada tahun 2017 namun berangsur naik dari tahun ke tahun. TPT Kab. Kepulauan Mentawai mengalami kenaikan 2,02 poin dari tahun 2017 yaitu 1,96 persen menjadi 3,98 persen tahun 2020. Pada Tahun 2020, terdapat 7 kabupaten/kota yang TPT-nya berada diatas TPT Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kab. Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.

TPT Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2017-2020

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kab. Kep. Mentawai	1,96	2,31	2,92	3,98	2,79
02. Kab. Pesisir Selatan	5,95	6,03	6,02	7,00	5,97
03. Kab. Solok	6,05	6,12	4,72	4,65	4,67
04. Kab. Sijunjung	3,32	3,22	3,64	5,30	3,57
05. Kab. Tanah Datar	3,72	4,01	3,20	4,79	4,63
06. Kab. Padang Pariaman	6,65	7,03	6,08	8,13	8,41
07. Kab. Agam	4,23	4,93	4,78	4,61	5,06
08. Kab. Lima Puluh Kota	2,60	2,73	2,30	3,03	2,25
09. Kab. Pasaman	6,81	6,04	5,28	5,04	4,92
10. Kab. Solok Selatan	5,54	5,84	4,91	5,62	4,84
11. Kab. Dharmasraya	3,69	4,02	5,06	5,31	5,00
12. Kab. Pasaman Barat	3,99	3,36	4,74	4,69	5,02
71. Kota Padang	9,44	9,29	8,74	13,64	13,37
72. Kota Solok	5,88	6,03	7,06	8,35	5,15
73. Kota Sawahlunto	6,19	5,92	6,84	8,20	6,38
74. Kota Padang Panjang	5,43	5,35	4,38	7,22	4,90
75. Kota Bukittinggi	6,94	7,24	6,20	7,51	6,09
76. Kota Payakumbuh	3,45	3,95	4,13	6,68	6,47
77. Kota Pariaman	5,97	5,82	5,48	5,73	6,09
Sumatera Barat	5,58	5,66	5,38	6,88	6,52

Catatan : Angka TPT 2016 untuk Kab/Kota tidak ada

Angka TPT 2018-2021 menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2020 dan BRS Ketenagakerjaan Agustus 2021, BPS

3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator tolok ukur keberhasilan pembangunan dari sisi kualitas hidup penduduknya. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu:

1. Kelompok "Sangat Tinggi": $IPM \geq 80$
2. Kelompok "Tinggi": $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok "Sedang": $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok "Rendah": $IPM < 60$

Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

IPM Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, IPM Sumatera Barat 70,73 sudah masuk kategori tinggi. Seiring dengan pertambahan tahun, IPM Sumatera Barat terus menaik menjadi 72,65 pada tahun 2021 dimana capaian pembangunan manusia Sumatera Barat termasuk tinggi. Peningkatan IPM ini dikarenakan semua komponen pembentuk IPM Sumatera Barat juga mengalami peningkatan selama tahun 2016-2021, kecuali pengeluaran per kapita mengalami sedikit penurunan di tahun 2020, dan kembali menaik di tahun 2021. Selain itu jika dibandingkan dengan IPM Nasional, IPM Sumatera Barat selalu diatas IPM Nasional (Tabel 3.4).

Ada 3 dimensi pembentuk IPM yaitu umur panjang dan sehat (umur harapan hidup), pendidikan (Harapan Lama Sekolah/RLS dan Rata-Rata Lama Sekolah) dan Standar Hidup Layak (pengeluaran per kapita). Dalam RPJMD Sumatera Barat disebutkan bahwa rata-rata lama sekolah menjadi perhatian pemerintah Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 RLS Sumatera Barat masih rendah yaitu 8,42. Selang enam tahun setelahnya rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan menjadi 9,07. Yang berarti rata-rata penduduk Sumatera Barat sudah berada di pendidikan formal paling tinggi sampai tamat SMP. Namun begitu, pencapaian pendidikan Sumatera Barat ini sudah melampaui proyeksi RLS yang sudah ditargetkan dalam RPJMD Sumatera Barat. Begitu juga halnya dengan semua komponen IPM Sumatera Barat juga melampaui target RPJMD Sumatera Barat.

Tabel 3.4.
IPM Menurut Komponen Pembentuknya Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia,
2016-2021

Komponen	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Suma- tera Barat	Indo- nesia	Suma- tera Barat	Indo- nesia	Suma- tera Barat	Indo- nesia	Suma- tera Barat	Indo- nesia	Suma- tera Barat	Indo- nesia	Suma- tera Barat	Indo- nesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Umur Harapan Hidup (UHH)	68,73	70,90	68,78	71,06	69,01	71,20	69,31	71,34	69,47	71,47	69,59	71,57
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,79	12,72	13,94	12,85	13,95	12,91	14,01	12,95	14,02	12,98	14,09	13,08
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25 th+)	8,59	7,95	8,72	8,10	8,76	8,17	8,92	8,34	8,99	8,48	9,07	8,54
Pengeluaran Perkapita di Sesuaikan (ribu Rp)	10 126	10 420	10 306	10 664	10 638	11 059	10 925	11 299	10 733	11 013	10 790	11 156
IPM	70,73	70,18	71,24	70,81	71,73	71,39	72,39	71,92	72,38	71,94	72,65	72,29

Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2019, BPS

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota

Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat cenderung positif selama tahun 2016-2021 (Tabel 3.5), ada beberapa Kabupaten/Kota yang negative di tahun 2020. Selama periode tersebut Kota Padang selalu memiliki IPM tertinggi dan Kab. Kepulauan Mentawai memiliki IPM Terendah. Pada tahun 2021, IPM Kota Padang mencapai 82,90 sehingga capaian pembangunan manusia di Kota Padang termasuk sangat tinggi sedangkan IPM Kab. Kepulauan Mentawai 61,35 masih termasuk kategori sedang. Walaupun memiliki IPM terendah, namun pertumbuhan Kab. Kepulauan Mentawai tahun 2021 tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain.

Level pencapaian pembangunan manusia Sumatera Barat yang tinggi pada tahun 2021 tidak menjamin bahwa pembangunan terjadi secara merata. Perbedaan capaian IPM antara daerah IPM tertinggi dan terendah selama tahun 2016 sampai 2021 berkisar 22 poin. Meskipun demikian, selama tahun 2016-2021 perbedaan IPM kedua daerah ini semakin kecil yaitu 22,79 poin pada tahun 2016 menjadi 21,55 pada tahun

2021. Pemerintah tentunya mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah agar disparitas antar wilayah ini semakin mengecil dan diupayakan untuk hilang.

Tabel 3.5.
IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2021

Kabupaten/Kota	IPM						Pertumbuhan (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01. Kep. Mentawai	58,27	59,25	60,28	61,26	61,09	61,35	1,65	1,71	1,60	-0,28	0,42
02. Pesisir Selatan	68,39	68,74	69,40	70,08	69,90	70,03	0,51	0,95	0,97	-0,26	0,19
03. Kab. Solok	67,67	67,86	68,60	69,08	69,08	69,24	0,28	1,08	0,69	0,00	0,23
04. Sijunjung	66,01	66,60	66,97	67,66	67,74	67,86	0,89	0,55	1,02	0,12	0,18
05. Tanah Datar	70,11	70,37	71,25	72,14	72,33	72,46	0,37	1,24	1,23	0,26	0,18
06. Padang Pariaman	68,44	68,90	69,71	70,59	70,61	70,76	0,67	1,16	1,25	0,03	0,21
07. Agam	70,36	71,10	71,70	72,37	72,46	72,57	1,04	0,84	0,93	0,12	0,15
08. Lima Puluh Kota	68,37	68,69	69,17	69,67	69,47	69,68	0,47	0,69	0,72	-0,29	0,30
09. Pasaman	64,57	64,94	65,60	66,46	66,64	66,77	0,57	1,01	1,29	0,27	0,19
10. Solok Selatan	67,47	67,81	68,45	68,94	69,04	69,23	0,50	0,93	0,71	0,14	0,27
11. Dharmasraya	70,25	70,40	70,86	71,52	71,51	71,76	0,21	0,65	0,92	-0,01	0,35
12. Pasaman Barat	66,03	66,83	67,43	68,21	68,49	68,76	1,20	0,89	1,14	0,41	0,39
71. Padang	81,06	81,58	82,25	82,68	82,82	82,90	0,64	0,81	0,52	0,17	0,10
72. Kota Solok	77,07	77,44	77,89	78,38	78,29	78,41	0,48	0,58	0,63	-0,11	0,15
73. Sawahlunto	70,67	71,13	71,72	72,39	72,64	72,88	0,65	0,82	0,93	0,34	0,33
74. Padang Panjang	76,50	77,01	77,30	78,00	77,93	77,97	0,66	0,38	0,90	-0,09	0,05
75. Bukittinggi	79,11	79,80	80,11	80,71	80,58	80,70	0,86	0,39	0,74	-0,16	0,15
76. Payakumbuh	77,56	77,91	78,23	78,95	78,90	79,08	0,45	0,41	0,91	-0,06	0,23
77. Pariaman	75,44	75,71	76,26	76,70	76,90	77,07	0,36	0,72	0,57	0,26	0,22
Sumatera Barat	70,73	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65	0,72	0,68	0,91	-0,01	0,37

Sumber: Sumatera Barat dalam Angka 2021, BPS

3.4 Nilai Tukar Petani (NTP)

Perekonomian Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sumatera Barat tahun 2016-2020 yang selalu menjadi paling besar. Oleh karena itu sektor pertanian menjadi salah satu yang menjadi fokus pembangunan Sumatera Barat. Selain itu kesejahteraan petani juga menjadi perhatian.

Pengukuran tingkat kesejahteraan petani dapat menggunakan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). NTP adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam persentase. Petani selain sebagai produsen yang memproduksi hasil pertanian, juga merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Dengan kata lain, nilai NTP menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan biaya produksi dan barang/jasa yang dikonsumsi. Semakin tinggi NTP relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Gambar 3.5.

Perkembangan NTP Tahunan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2016-2020



Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2020, BPS

Pada gambar 3.5 terlihat bahwa NTP Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 selalu dibawah angka nasional dan baru mencapai diatas 100 pada tahun 2020. NTP yang kurang dari 100 menunjukkan bahwa NTP tahun bersangkutan kurang baik

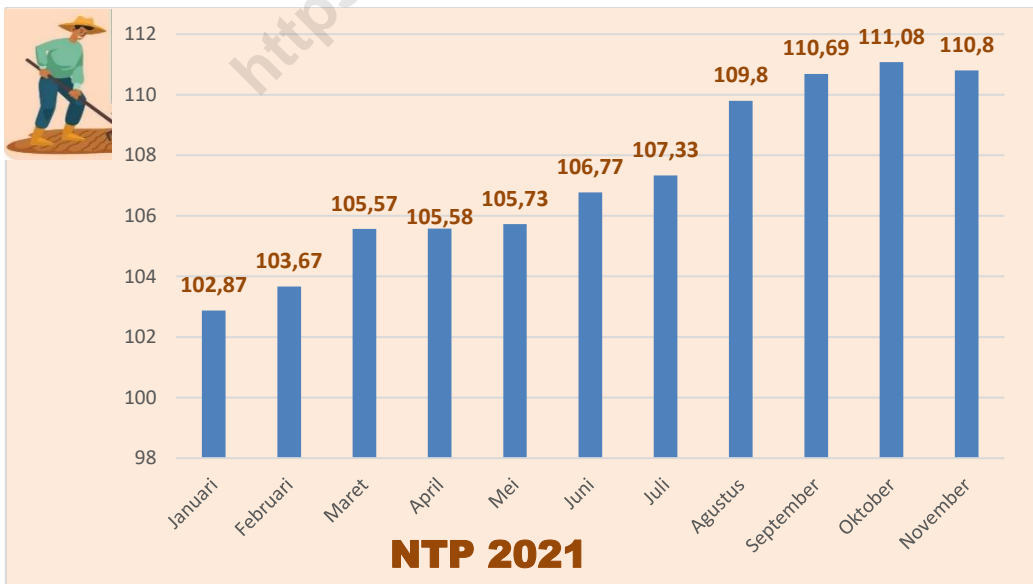
dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar sehingga petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi.

Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2016 (sebesar 97,67 persen) terus mengalami penurunan sampai tahun 2018 menjadi 95,31 persen, kemudian mengalami kenaikan sebesar 0,71 persen menjadi 95,99 persen pada tahun 2019 dan menjadi 100,59 di tahun 2020. Hal ini berarti tingkat kemampuan daya beli dan daya tukar petani di pedesaan meningkat dibandingkan tahun 2018.

Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2021

Perkembangan NTP Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 terlihat pada gambar 3.6, NTP bulan Januari 2021 mencapai 102,87 yang berarti petani mengalami surplus atau harga produksinya naik lebih besar daripada kenaikan harga barang/jasa konsumsi. Keadaan ini terus menaik sampai pada bulan November 2021 dimana NTP mencapai 110,80 persen.

Gambar 3.6.
Perkembangan NTP Bulanan Sumatera Barat, 2021



Sumber: Kumpulan BRS Perkembangan NTP Provinsi Sumatera Barat 2021, BPS

4 PERKEMBANGAN PARIWISATA DAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD) PROVINSI SUMATERA BARAT 2016-2021



Jumlah Wisatawan Mancanegara
yang Datang ke Sumatera Barat Tahun 2020

10.875  Menurun **78,11%**
dibandingkan tahun 2016
orang

Jumlah wisatawan negara merupakan data wisatawan yang masuk melalui pintu imigrasi Bandara Internasional Minangkabau (BIM)

TPK Tingkat Penghunian Kamar

35,34  Tingkat Penghunian Kamar
Hotel Bintang Tahun 2020

13,11  Tingkat Penghunian Kamar
Hotel Non Bintang Tahun 2020



Jumlah Desa/Nagari di Sumatera Barat Menurut Kategori IPD

» Perkembangan jumlah desa menurut status IPD **866 desa**
yang sama yang telah ada sejak tahun 2014

» Berdasarkan Hasil Podes
Tahun 2018, jumlah desa/
kelurahan/nagari di
Sumatera Barat sebanyak

1.275
yang terdiri dari **1.045 desa/
nagari dan 230 kelurahan**.
Terjadi penambahan 159
desa/nagari dibandingkan
tahun 2014 (**866 desa/nagari**).

181

Desa/
Nagari

Mandiri
Meningkat
112,94%
dibandingkan
tahun 2014

677

Desa/
Nagari

Berkembang
Menurun
9,12%
dibandingkan
tahun 2014

28

Desa/
Nagari

Tertinggal
Menurun
50,00%
dibandingkan
tahun 2014



4. PERKEMBANGAN INDIKATOR PARIWISATA DAN INDEKS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, 2016-2021

4.1 Pariwisata

Sumatera Barat terkenal dengan beragam objek wisata, diantaranya ada objek wisata pantai, gunung, danau, ngarai dan wisata sejarah. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan pembangunan sektor pariwisata salah satu prioritas pembangunan. Pemerintah menargetkan Provinsi Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya, dengan sasaran meningkatkan kunjungan wisatawan.

Tabel 4.1.

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2021

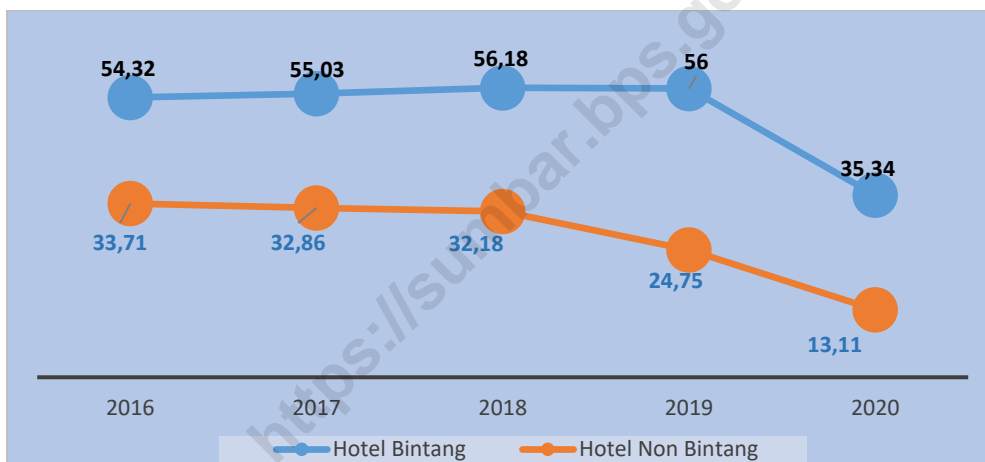
Bulan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jan	3 378	4 020	3 253	4 528	4 341	0
Feb	3 892	4 045	4 459	5 144	4 038	0
Mar	4 428	4 989	5 057	6 196	2 495	0
Apr	4 063	4 558	4 293	5 434	0	0
Mei	4 854	4 109	3 002	3 576	0	0
Jun	2 104	2 940	4 549	5 212	0	0
Jul	4 094	4 080	5 100	5 183	0	0
Agt	4 224	5 209	5 602	5 967	0	0
Sep	3 329	4 347	5 094	4 427	1	0
Okt	4 980	4 826	4 055	5 271	0	0
Nov	5 115	4 622	5 118	5 013	0	
Des	5 225	8 568	4 801	5 180	0	
Jumlah	49 686	56 313	54 383	61 131	10 875	0

Sumber: Kumpulan BRS Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Sumatera Barat 2016-2021, BPS

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Provinsi Sumatera Barat, dari tahun 2016-2019 trennya mengalami kenaikan kecuali tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Demikian juga untuk tahun 2020 terjadi penurunan yang drastis, dimana tidak ada

kunjungan wisatawan mancanegara selama April 2020 – Oktober 2021, kecuali pada September 2020 terdapat 1 kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini dikarenakan pembatasan mobilisasi penduduk dan penerbangan yang masuk ke Sumatera Barat diakibatkan pandemi COVID-19. Jumlah wisatawan mancanegara ini merupakan data wisatawan yang masuk melalui pintu imigrasi di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Jika dilihat perkembangan tiap bulannya, jumlah kunjungan wisman selama periode 2016-2020 berfluktuasi.

Gambar 4.1.
TPK Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang
di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020



Sumber: Tingkat Penghunian Kamar Hotel Provinsi Sumatera Barat 2020, BPS

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kinerja usaha penyedia akomodasi/hotel pada periode tertentu adalah Tingkat Penghunian Kamar (TPK). TPK adalah perbandingan antara banyaknya kamar yang terpakai dengan banyaknya kamar yang tersedia (dalam persen), yang menunjukkan apakah suatu akomodasi diminati oleh pengunjung atau tidak. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi hotelnya selama tahun 2016-2020 maka TPK hotel bintang lebih tinggi dibandingkan TPK hotel non bintang (gambar 4.1). Hal ini menunjukkan wisatawan yang datang ke Sumatera Barat lebih memilih tinggal di hotel bintang daripada non bintang.

Perkembangan TPK hotel bintang tahun 2016-2020 di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2016-2019, kecuali TPK tahun 2019 (56,00 persen) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 (56,18 persen). TPK

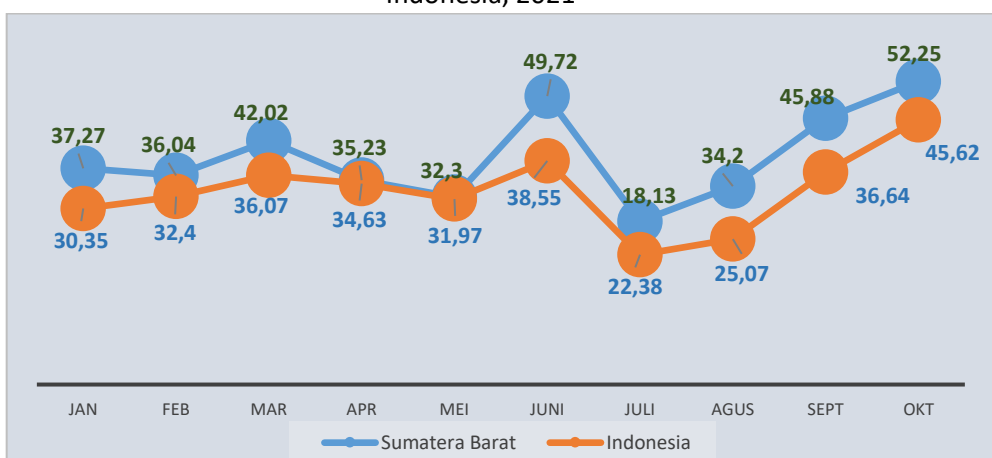
hotel bintang tahun 2016-2019 selalu diatas 50 persen. Ini berarti rata-rata lebih dari setengah jumlah kamar yang tersedia dipakai setiap malam pada seluruh hotel bintang di Sumatera Barat selama 2016-2019. Hal ini juga menunjukkan akomodasi yang tersedia di Sumatera Barat cukup diminati oleh wisatawan. Lain halnya pada tahun 2020, TPK hotel bintang (35,34 persen) mengalami penurunan yang drastis di banding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan dampak terjadinya pandemi COVID-19.

Sebaliknya, perkembangan TPK hotel non bintang terus menurun setiap tahun selama 2016-2020. TPK hotel non bintang pada tahun 2016 mencapai 33,71 persen mengalami penurunan 8,96 poin menjadi 24,75 persen dibandingkan tahun 2019. Dan tahun 2020 TPK hotel non bintang (13,11 persen), mengalami penurunan yang drastis di banding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga diakibatkan terjadinya pandemi COVID-19.

Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Tahun 2021

Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 sangat berfluktuasi dan berada diatas TPK nasional (gambar 4.2). TPK hotel berbintang di Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2021 paling tinggi dicapai pada bulan Juni 2021 (49,72 persen) dan TPK hotel berbintang terendah terjadi pada bulan Juli 2021 (28,13 persen).

Gambar 4.2.
Perkembangan TPK Hotel Bintang di Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, 2021



Sumber: Kumpulan BRS Perkembangan Pariwisata Sumatera Barat 2021, BPS

4.2 Indeks Pembangunan Daerah (IPD)

Salah satu indikator yang menunjukkan pencapaian kinerja pembangunan adalah Indeks Pembangunan Desa (IPD). IPD merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. IPD terdiri dari 42 indikator yang digolongkan dalam 5 dimensi yaitu ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah. Kelima dimensi ini nantinya menjadi dasar dalam mengklasifikasikan desa menjadi 3 status yaitu Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Mandiri. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut.

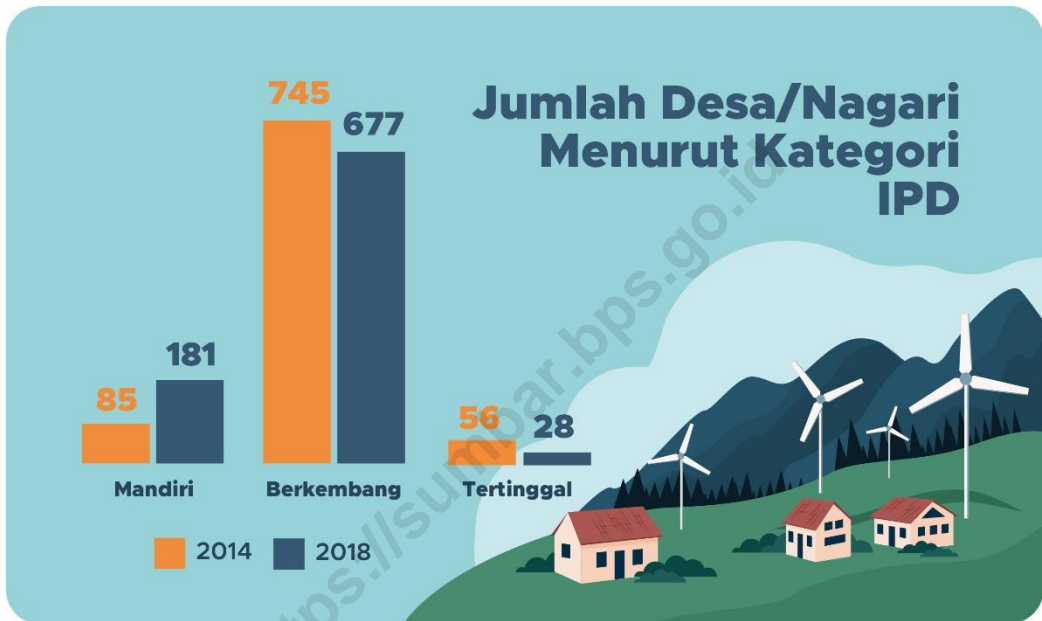
IPD dibentuk berdasarkan data hasil dari survei Potensi Desa (Podes) yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Podes sendiri merupakan kegiatan sensus terhadap seluruh wilayah administrasi terendah setingkat desa/kelurahan/nagari, termasuk pendataan di kecamatan dan kabupaten/kota. Dari data podes ini dapat dilihat keadaan dan potensi suatu desa.

Berdasarkan hasil Podes Sumatera Barat tahun 2018, jumlah desa/kelurahan/nagari di Sumatera Barat sebanyak 1.275 yang terdiri dari 1.045 desa/nagari dan 230 kelurahan. Terjadi penambahan desa/nagari sebanyak 159 desa/nagari dibandingkan tahun 2014 (886 desa/nagari). Desa/Nagari/Kelurahan yang termasuk dalam penghitungan IPD adalah hanya yang berstatus desa dan nagari. Menurut status IPD, sebagian besar desa di Sumatera Barat pada 2018 merupakan desa berkembang, yaitu mencapai 76,94 persen dan desa mandiri sebanyak 20,10 persen. Hal ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi keempat dengan persentase jumlah desa mandiri tertinggi di Indonesia.

Gambar4.2 memperlihatkan perkembangan jumlah desa menurut status IPD di 866 desa yang sama, yang telah ada sejak tahun 2014. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, pada tahun 2018 lebih dari separuh desa tertinggal sudah tidak berstatus desa tertinggal lagi yaitu 56 desa/nagari menjadi hanya 28 desa/nagari. Begitu juga dengan desa berkembang penurunannya mendekati 10 persen. Sebaliknya penambahan desa mandiri lebih dua kali lipat, mencapai 112,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan desa yang dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat sampai

pemerintah desa telah berhasil meningkatkan status suatu desa yang dulunya desa tertinggal menjadi desa berkembang atau mandiri.

Gambar 4.3.
Jumlah Desa/Nagari Menurut Kategori IPD
Provinsi Sumatera Barat, 2014-2018



Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2019, BPS

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta: CV. Dharmaputra
- _____. 2015. Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2010-2020 Provinsi Sumatera Barat. Jakarta: BPS
- _____. 2021. Indeks Pembangunan Manusia 2020. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2021. Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat 2020. Padang: CV. Sarana Multi Abadi
- _____. 2018. Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2015-2025 Hasil Supas 2015. Padang: CV. Sarana Multi Abadi
- _____. 2021. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat 2020. Padang: CV. Graphic Dwipa
- _____. 2021. Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2020. Padang: CV. Graphic Dwipa
- _____. 2021. Sumatera Barat dalam Angka 2021. Jakarta: CV. Petratama Persada
- _____. 2021. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Barat 2016-2020. Padang: CV. Graphic Dwipa
- Irawan, Puguh Brodo dkk. 2016. Official Statistics Sosial-Kependudukan Dasar. Bogor: In Media
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2018. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sekretaris Daerah. Padang
- Prakasa, K. dan Andini, A. Dilema paara Pengangguran Terdidik. <https://lokadata.id/artikel/dilema-para-pengangguran-terdidik>. Diakses 3 Agustus 2020.
- Syafitri, A. dan Ariusni. 2019. "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat" dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Volume 1 Nomor 2 Mei 2019 (hlm. 351-364).
- Todaro, M. P dan Smith, S.C. 2003. Economic Development, Eight Edition. England: Pearson Education Limited

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sumbar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang 25135
Telp.: 0751-442158/442159
Homepage: <http://sumbar.bps.go.id>
E-mail: bps1300@bps.go.id